

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG

Virginia Elvira Dey Putri
NPP 30.1154

Asdaf Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Kebijakan Publik
Gmail: virginiadey528@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Vinda Verina KDP, S.STP, M.Tr.I.P

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background(GAP):

Stunting is one of the problems of nutritional status in toddlers which is still a problem in the world, including Indonesia until now. In 2018, East Nusa Tenggara occupied the highest percentage of Stunting cases in Indonesia at 42.6%. In the province of East Nusa Tenggara, one of the areas that has become a priority in handling Stunting is the City of Kupang. Alak as a fish-producing area and the highest Stunting in Kupang City is the background in accelerating the reduction in Stunting rates by the Governor of NTT by issuing a policy through the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara Number: 324/KEP/HK/2018 concerning the Commission for the Acceleration of Stunting Management, a working group was formed Stunting, supported by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning accelerating the prevention of Stunting.

Purpose: The Purpose of this study is to analyze the Implementation of the Policy for the Acceleration of Stunting Management in Alak District, Kupang City, to analyze the determinant factors (supporting and inhibiting factors) in implementing policies to accelerate the reduction of stunting in Alak District, Kupang City and analyze efforts to tackle stunting in Alak District, Kupang City. **Method:** In this study, researchers used the Postpositivism approach and Grand Teory Edward III. Postpositivism is a paradigm used in qualitative research. Criticism of positivism, the strong influence of positivism on this method, especially the treatment of theories that are still deductive in nature, is the paradigm of Postpositivism. Thus the Postpositivism derivative methodology cannot be fully described as qualitative research. In general, data collection methods can be divided into several groups, Direct observation method, Interview method, and Special method. **Result:** Based on research on eleven indicators in four dimensions by Edward III in his research on accelerating response, there are eight indicators of successful stunting, namely consistency, clarity, staffing, authority, appointment of bureaucrats and incentives. The three indicators that have not been successful are information, facilities, and transmission. **Conclusion:** there are eight indicators of successful stunting, namely consistency, clarity, staffing, authority, appointment of bureaucrats and incentives. The three indicators that have not been successful are information, facilities, and transmission.

Keywords : Stunting, Nutritional status, TPPS

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP):

Stunting merupakan salah satu permasalahan status gizi pada balita yang masih menjadi masalah di dunia termasuk negara Indonesia hingga saat ini. Pada tahun 2018, Nusa Tenggara Timur menduduki presentase tertinggi kasus *Stunting* di Indonesia sebesar 42,6 %. Di provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan *Stunting* adalah Kota Kupang. Alak sebagai daerah penghasil ikan dan *Stunting* tertinggi di Kota Kupang menjadi latar belakang dalam percepatan penurunan angka *Stunting* oleh Gubernur NTT adalah dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting* maka dibentuk kelompok kerja *Stunting*, didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan *Stunting*. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Alak Kota Kupang, menganalisis faktor determinan (faktor pendukung dan penghambat) dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Alak, Kota Kupang dan menganalisis upaya penanggulangan *stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Postpositivism dan Grand Teory Edward III. Postpositivisme adalah paradigma yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Kritik terhadap positivisme, kuatnya pengaruh positivisme terhadap metode ini, khususnya perlakuan terhadap teori-teori yang masih bersifat deduktif, merupakan paradigma Postpositivisme. Dengan demikian metodologi turunan Postpositivisme tidak dapat sepenuhnya digambarkan sebagai penelitian kualitatif. Secara umum metode pengumpulan data dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu metode observasi langsung, metode wawancara, dan metode khusus. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian terhadap sebelas indikator dalam empat dimensi oleh Edward III dalam penelitiannya tentang percepatan penanggulangan, terdapat delapan indikator keberhasilan *stunting* yaitu konsistensi, kejelasan, kepegawaian, kewenangan, penunjukan birokrat dan insentif. Tiga indikator yang belum berhasil adalah informasi, fasilitas, dan transmisi. **Kesimpulan:** Adapun delapan indikator keberhasilan *stunting* yaitu konsistensi, kejelasan, kepegawaian, kewenangan, penunjukan birokrat dan insentif. Tiga indikator yang belum berhasil adalah informasi, fasilitas, dan transmisi.

Kata Kunci: *Stunting*, status gizi, TPPS

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Status gizi kurang, kerdil, pertumbuhan melambat adalah ciri-ciri seorang menderita *Stunting*. Hingga saat ini *Stunting* menjadi permasalahan internasional. Negara Indonesia tidak luput dari masalah *Stunting*. Suatu kondisi dimana tumbuh kembang balita melambat (bayi di bawah lima tahun) ditandai dengan kondisi pendek (kerdil) untuk usianya. Balita penderita *Stunting* dapat mengalami penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko menderita penyakit degeneratif pada usia menuju dewasa. Sehingga, pola pencegahan yang dilakukan adalah bayi-bayi yang akan lahir harus dipersiapkan pasca kelahiran dan pasangan yang ingin menikah harus sehat. Pernikahan dan perkawinan adalah 2 (dua) hal yang wajib dipersiapkan dengan matang demi lahirnya generasi yang sehat. Sehingga himbuan BKKBN untuk menurunkan angka *Stunting* adalah semua ibu hamil harus didampingi oleh bidan dan melaporkan masa kehamilannya secara berkala. *United Nations Internasional Children's Emergency*

(UNICEF) (2020) menyatakan bahwa tahun 2020, balita di dunia yang menderita *Stunting* ada 144 juta jiwa dimana benua Asia menjadi peringkat pertama balita yang menderita *Stunting* dengan presentasi sebesar 54%. Secara global, Indonesia menduduki peringkat kelima teratas angka terkait *Stunting* atau sekitar 7,5 juta jiwa. Penduduk Indonesia berjumlah 269 juta jiwa dan sepertiganya adalah anak-anak atau sekitar 89 juta dari jumlah tersebut sebanyak 7,5 juta balita menderita *Stunting*. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) melaporkan tahun 2021 terdapat sebanyak 24,4% balita di Indonesia mengalami *Stunting*. Adapun 10 (sepuluh) Provinsi yang memiliki angka *Stunting* tertinggi nasional tahun 2021 diantaranya: NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Gorontalo. Di provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan *Stunting* adalah Kota Kupang. Sebagai daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan *Stunting* Kota Kupang berupaya untuk menekan laju percepatan angka *Stunting*. Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi NTT yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan Alak menduduki posisi pertama jumlah anak penderita *Stunting* terbanyak dan masuk dalam salah satu kecamatan yang masuk dalam prioritas penanganan *Stunting* di Kota Kupang. Kecamatan Alak terdiri dari 6 kelurahan yaitu Alak, Namosain, Nunbaun Sabu, Nunbaun Delha, Nunhila dan Penkase Oeleta. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 di Kecamatan Alak, mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan sejumlah 1.431 menduduki posisi terbanyak di Kota Kupang. Walaupun kecamatan Alak merupakan penghasil ikan dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan namun masih banyak anak penderita *Stunting* di kecamatan Alak. Sebagai daerah dengan mata pencaharian nelayan tertinggi di Kota Kupang, kecamatan Alak seharusnya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Situasi ini berkaitan dengan gizi yang kurang dari penderita *Stunting* adalah bersumber dari protein hewani seperti ikan, telur, dan daging ayam. (Emawati, Fitrah dkk 2016).Melihat realitas penderita *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang, maka pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT berupaya untuk menekan angka *Stunting* di Provinsi NTT, khususnya di Kecamatan Alak baik melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait bahaya *Stunting* dan intervensi gizi. Adanya tren kenaikan presentase *Stunting* membuat pemerintah kecamatan harus bekerja keras dalam bidang kesehatan agar pencapaian target penurunan angka *Stunting* dengan mengimplementasi kebijakan pemerintah daerah provinsi NTT dalam percepatan penanggulangan *Stunting* dapat dilaksanakan secara optimal khususnya di kecamatan Alak. Untuk mempercepat penurunan angka *Stunting* Gubernur NTT mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting* maka dibentuk kelompok kerja *Stunting*, dimana peraturan daerah ini menjadi dasar dibentuknya kelompok kerja *Stunting* yang dikenal dengan nama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Pembentukan TPPS merupakan salah satu cara cepat yang diambil oleh pemerintah provinsi NTT untuk menjembatani penyelesaian permasalahan kenaikan prevalensi *Stunting*. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) berada pada tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Desa/kelurahan sebagai penggerak pada tingkat Kecamatan, TPPS terdiri dari tenaga Kesehatan, penyuluh keluarga berencana, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), dan pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD). TPPS bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.

I.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang sebagai berikut:

1. Tingginya Angka *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang;
2. Kurangnya kolaborasi lintas sektor melalui OPD terkait dalam penanganan *Stunting*;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terkait bahaya *Stunting* (faktor penghambat);
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Kesehatan;
5. Belum optimalnya Peran TPPS (tim percepatan penurunan *Stunting*).

Beberapa masalah yang teridentifikasi di atas tentu akan memakan waktu dan biaya dalam penelitian. Oleh sebab itu maka peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan diteliti pada tahun 2018-2022 dan menjadi fokus penelitian yaitu lokus penelitian di Kecamatan Alak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Peneliti dalam hal ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang.

I.1 Penelitian Terdahulu

Kajian Empiris merupakan penelitian – penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penulisan ini sebagai berikut, Penelitian terdahulu dari Adriana Rodina Fallo dalam jurnal Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan KIE” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara dan kuesioner kemudian menganalisis jawaban narasumber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Model Implementasi kebijakan public Edward III yang mengungkapkan 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Cresswell (2016), Teknik ini dapat memberikan gambaran dan eksplorasi data yang tepat dan relevan dengan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian berupa stunting menjadi ancaman cukup serius bagi anak -anak Indonesia khususnya di Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam proses kebijakan publik dilihat dari tataran implementasinya. Implementasi kebijakan pencegahan stunting masih ditemui beberapa permasalahan dalam aspek komunikasi, sementara dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan stunting. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, waktu penelitian serta kasus yang diteliti, serta persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kebijakan pencegahan stunting, serta menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian terdahulu yang kedua berasal dari Rafih Sri Wulandari dalam jurnal Universitas Langlangbuana tahun 2019 dengan judul “Implementasi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bandung Barat” penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan teori Edward III (1980:10-12) dengan empat faktor kritis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini berupa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum maksimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami cara penurunan stunting. Selain itu, untuk meningkatkan hasil kebijakan yang maksimal perlu kerja sama antar dinas ditingkatkan agar program penurunan dapat berjalan dengan baik. Anggaran untuk penanganan stunting yang sudah disiapkan harus tepat

sasaran, baik anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menekan stunting di Kabupaten Bandung Barat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, waktu penelitian serta kasus yang diteliti, serta persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pencegahan stunting serta menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian terdahulu yang ketiga berasal dari Penelitian terdahulu dari Hafzana Bedasari dkk, (2021) jurnal Universitas Karimun dengan judul “Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun” program kegiatan yang dilaksanakn dalam penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi dan tanya jawab dengan narasumber. Penelitian ini memuat hasil kegiatan sosialisasi tentang stunting kepada masyarakat Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun yang belum mengetahui tentang stunting. Penelitian ini membuktikan bahwa perlu adanya penanganan lebih lanjut dari pemerintah mengenai program pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya melalui kegiatan penyuluhan saja tetapi perlu menambah tenaga Kesehatan dan fasilitas penanganan kesehatan untuk pelaksanaan program selanjutnya. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, waktu penelitian serta kasus yang diteliti, serta persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kebijakan pencegahan stunting serta menggunakan teknik wawancara. Penelitian terdahulu mendalami tentang promosi kesehatan (penyuluhan) mengenai stunting.

I.1 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang berbeda dan konteks penelitan yang dilakukan fokus pada satu kebijakan khusus oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Nomor: 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting* maka dibentuk kelompok kerja *Stunting*, dimana peraturan daerah ini menjadi dasar dibentuknya kelompok kerja *Stunting* yang dikenal dengan nama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Pembentukan TPPS merupakan salah satu cara cepat yang diambil oleh pemerintah provinsi NTT untuk menjembatani penyelesaian permasalahan kenaikan prevalensi *Stunting*. Penelitian ini mengacu pada teori Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan data *Stunting* zona kecamatan tahun 2020 alak menduduki peringkat pertama jumlah anak penderita *Stunting*. Hal ini termasuk yang mendasari pada tahun 2021 data kementerian kesehatan menunjukkan provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai presentase bayi *Stunting* tertinggi di Indonesia. Penanganan *Stunting* tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT namun membutuhkan peran dari BKKBN dan OPD lainnya, untuk menekan angka *Stunting* sehingga perlu adanya kolaborasi lintas sektor. Oleh sebab itu Peneliti ingin mengupas tuntas permasalahan di lapangan dengan menggambarkan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting* di kecamatan alak kota kupang dengan menggunakan *Grand teori Edward III* yang memuat empat indikator yang dapat menjawab rumusan masalah dengan faktor determinan permasalahan yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penelitian ini. Peneliti berupaya untuk mengetahui keberhasilan implementasi keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting*.

I.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Alak Kota Kupang, Untuk menganalisis faktor determinan (faktor pendukung dan penghambat) dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Alak, Kota Kupang dan Untuk menganalisis upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Alak Kota Kupang.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Postpositivisme*. *Postpositivisme* merupakan paradigma yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Kritik terhadap positivisme, pengaruh positivisme yang kuat terhadap metode ini terutama perlakuan terhadap teori yang masih bersifat deduktif merupakan paradigma *Postpositivisme*. Dengan begitu metodologi turunan *Postpositivisme* belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Paradigma *Postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, dimana kejadian sosial yang nyata dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, bermakna dan interaktif. Penelitian ini dilihat sisi positivisme terlihat ketika memulai penelitian secara deduktif menggunakan teori, dengan begitu desain ini benar-benar kuantitatif. Ketika mulai memasuki tahap analisis data desain berubah menjadi penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan secara induktif melalui cara berfikir peneliti dalam menganalisis data. Data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). MDAP merupakan teknik analisis data dengan memproses data secara manual. Tahapan dalam MDAP disebut oleh Straus dan Glaser (1967) dalam Bungin (2021) sebagai *theoretical sampling*. *Theoretical sampling* adalah sebuah proses dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan, mengodekan dan menganalisis serta menentukan data apa yang perlu untuk dikumpulkan selanjutnya dimana data tersebut bisa didapatkan untuk mengembangkan teori yang perlahan mulai tampak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala jenis informasi serta data yang didapatkan digabungkan dalam proses penelitian, disesuaikan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III. Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pedoman peneliti dalam melihat faktor yang menjadi pendukung maupun yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan :

3.1 Komunikasi

komunikasi dapat disimpulkan bahwa pada indikator transmisi dinyatakan belum berhasil karena sasaran proyeksi dan sasaran riil dari program pengukuran berat dan tinggi badan serta pemberian makanan tambahan berbeda sedangkan pada indikator kejelasan dinyatakan berhasil karena pada indikator kebijakan ini masyarakat telah menunjukkan sikap menerima kebijakan camat Alak dengan memberikan bantuan sukarela. Indikator konsistensi telah dipedomani sejak permasalahan gizi bermunculan melalui tujuh indikator dalam mengidentifikasi *Stunting* yang menjadi tameng bagi pelaksana kebijakan untuk menurunkan angka *Stunting*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi sudah berjalan optimal.

3.2 Sumber Daya

Dimensi Sumber Daya dapat disimpulkan bahwa terdapat dua indikator dinyatakan belum berhasil yaitu informasi tentang *Stunting* yang tidak dialami oleh orang tua, fasilitas yang tidak memadai karena belum terdapat rumah posyandu. Adapun dua indikator yang berhasil yaitu jenjang pendidikan staf/pegawai dinas kesehatan didasari ilmu kesehatan masyarakat dan rincian gugus tugas komisi percepatan penanggulangan *Stunting*. Untuk menarik kesimpulan keberhasilan dimensi ini peneliti fokus kepada lokasi penelitian yaitu Kecamatan Alak. Interaksi secara langsung antar kader dan orang tua bayi/balita yang berperan penting dalam indikator ini, jika tempat bersosialisasi dan pemberian informasi serta pemberian makanan tambahan tidak ada yaitu rumah posyandu maka akan mempengaruhi sasaran keluarga sesuai dengan Lampiran XI data balita wasting hasil e-PPGBM yang mengalami perbedaan sasaran proyeksi dan sasaran riil dan berdampak pada data stunting. Jika data *Stunting* tidak lengkap maka kebijakan dan program pemerintah untuk menurunkan angka *Stunting* akan tidak tepat sasaran sehingga dimensi sumber daya dinyatakan belum berhasil.

3.3 Disposisi

Dimensi disposisi telah berhasil dinilai dari penjelasan informan dan data yang mendukung pengangkatan birokrat dan insentif sehingga dimensi ini dinyatakan berhasil pada implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting*.

3.4 Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi telah berhasil dinilai dari SOP dan fragmentasi sehingga dimensi ini dinyatakan berhasil pada implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting*.

3.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang didapatkan dari sebelas indikator dalam empat dimensi terdapat delapan indikator yang berhasil sehingga berpedoman pada teori Edward III peneliti mengklasifikasikan faktor pendukung implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting* antara lain:

1. Santunan Warga Kecamatan Alak
2. Tujuh Indikator Identifikasi Stunting
3. Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Rincian Tugas Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting*
5. TPPS Berdasarkan Keputusan Gubernur
6. Dana Insentif Bagi Kader Posyandu
7. Hubungan Kerja POKJA *Stunting* dengan OPD lain

3.6 Upaya Penanganan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang

Adapun tiga indikator dalam kedua dimensi menurut Edward III di penelitian ini masih belum berhasil yaitu transmisi, informasi dan fasilitas. Sehingga peneliti ingin memperlihatkan kepada pembaca upaya penanganan agar indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan berhasil yaitu:

1. Sosialisasi dengan tokoh-tokoh agama
2. Konvergensi Stunting
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak telah berjalan dengan optimal yang dapat dibuktikan dari penelitian yang mengacu pada indikator dan dimensi yang dikemukakan oleh Edward III. Berdasarkan penelitian dari sebelas indikator dalam empat dimensi oleh Edward III dalam penelitian percepatan penanggulangan terdapat delapan indikator *Stunting* yang berhasil yaitu konsistensi, kejelasan, staf, wewenang, pengangkatan birokrat dan insentif. Adapun tiga indikator yang belum berhasil yaitu informasi, fasilitas, dan transmisi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak telah berjalan dengan optimal yang dapat dibuktikan dari penelitian yang mengacu pada indikator dan dimensi yang dikemukakan oleh Edward III. Berdasarkan penelitian dari sebelas indikator dalam empat dimensi oleh Edward III dalam penelitian percepatan penanggulangan terdapat delapan indikator *Stunting* yang berhasil yaitu konsistensi, kejelasan, staf, wewenang, pengangkatan birokrat dan insentif. Adapun tiga indikator yang belum berhasil yaitu informasi, fasilitas, dan transmisi. Berdasarkan penelitian di Kecamatan Alak dan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa tiga faktor pendukung keberhasilan percepatan penanggulangan *Stunting* antara lain:

1. Santunan Warga Kecamatan Alak
2. Tujuh Indikator Identifikasi *Stunting*
3. Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Rincian Tugas Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting*
5. TPPS Berdasarkan Keputusan Gubernur
6. Dana Insentif Bagi Kader Posyandu
7. Hubungan Kerja POKJA *Stunting* dengan OPD lain

Adapun tiga faktor penghambat keberhasilan percepatan penanggulangan *Stunting* yaitu:

1. Sasaran Proyeksi dan Riil berbeda
2. Kurang Pemahaman Tentang *Stunting*
3. Fasilitas Kurang Memadai

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana kebijakan di Kecamatan Alak berdasarkan tiga indikator yang belum berhasil yaitu :

1. Sosialisasi dengan Tokoh-Tokoh Agama
2. Konvergensi *Stunting*
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu, jarak dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas penelitian indikator *Stunting* melalui kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan kaitannya dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ketiga poin ini merupakan faktor-faktor kuat yang melatarbelakangi kejadian *Stunting* di suatu daerah namun belum diteliti sepenuhnya oleh peneliti.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT termasuk dalam unsur organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan untuk melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan serta pembinaan khusus bagi masyarakat, dan Kecamatan Alak yang telah membantu penulis memperoleh data di lapangan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, 2018. *Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Burhan Bungin, 2021. *Social Research Methods (Post-Qualitative)*, Jakarta: Kencana

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfabetaSubarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting* maka dibentuk kelompok kerja *Stunting*
Fallo, Adriana Rodina. 2020. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN *STUNTING* OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI KECAMATAN KIE. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Tahun 2020. Kupang. Universitas Nusa Cendana

Bedasari, Hafzana. dkk 2011. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CEGAH *STUNTING* DI DESA SEPEDAS KELURAHAN PASIR PANJANG KABUPATEN KARIMUN. *Jurnal Awam*. Volume 1, Nomor 2, Karimun: Universitas Karimun.

Wulandari, Rafih Sri, 2019. IMPLEMENTASI PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Sosial dan Politik*. Volume 24, Nomor 2, Bandung Barat: Universitas Langlangbuana.

